

### BAB III

## PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKONOMI BARU 1971-1975

### III.1. Keadaan Ekonomi Malaysia sebelum 1969

Semua kegiatan ekonomi pada masa penjajahan Inggris di Malaya dikontrol dan dikuasai oleh non-Melayu, khususnya Cina, sehingga terjadi kesenjangan ekonomi di antara Melayu dan non-Melayu.<sup>110</sup> Masalah kesenjangan ekonomi antara Melayu dan non-Melayu, khususnya Cina merupakan ancaman terhadap ketentraman yang ada di Malaysia. Dimulai dari kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Inggris yang telah memberikan kesempatan penuh terhadap kaum imigran dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang penting dalam periode sebelum kemerdekaan, yang mengakibatkan posisi ekonomi Melayu menjadi lemah.<sup>111</sup> Masalah Melayu yang secara ekonomi lemah di negaranya sendiri telah menjadi dasar yang krusial dalam ketegangan politik di dalam negara tersebut.

Pada waktu Inggris memutuskan untuk melakukan intervensi ke negara-negara bagian Melayu, mereka sudah mencapai puncak kekuasaan dengan negara jajahan yang tersebar di mana-mana. Terutama dengan revolusi Industri di Inggris, timbulah suatu kelas kapitalis baru. Para kapitalis Inggris mempunyai kelebihan finansial yang dapat mereka investasikan dalam negara jajahan mereka untuk pengembangan industri dalam rangka memproduksi bahan baku yang diperlukan oleh pabrik-pabrik Inggris.<sup>112</sup> Perkembangan pertambangan timah, perkebunan karet dan perdagangan memperkuat usaha-usaha kapitalis dari Inggris. Sistem tersebut berkembang secara perlahan tapi pasti. Industri tersebut juga menarik perhatian pengusaha-pengusaha Cina dan India, tetapi usaha mereka terbatas karena tidak dapat mengumpulkan modal dalam jumlah besar yang dibutuhkan sebagaimana yang dimiliki Inggris.<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup> Paridah Abd. Samad, *Op. Cit.*, hlm. 62.

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> S. Husin Ali, *Rakyat Melayu Hasil dan Masa depannya* ( Jakarta: PT Inti Sarana Aksara, 1985), hlm. 101.

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

Dalam perdagangan, terutama di daerah perkotaan yang berkembang pesat, dibuka warung-warung untuk melayani penjualan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Kebanyakan warung dan perusahaan kecil dimiliki oleh orang-orang Cina dan India. Disamping itu, pedagang-pedagang lain juga masuk ke daerah pedesaan untuk berdagang. Pedagang tersebut kemudian menjadi pedagang perantara yang menjual produksi pertanian ke kota dan membeli barang-barang impor untuk di jual baik di daerah perkotaan maupun di desa-desa.<sup>114</sup>

Keterlibatan orang-orang Melayu dalam perkebunan dan perdagangan pada dasarnya tidak ada,<sup>115</sup> sekalipun dalam skala yang kecil. Kebanyakan orang-orang Melayu tinggal di daerah pedesaan dan mengolah lahan pertanian secara tradisional. Mereka bukan hanya tidak memiliki modal juga tidak memiliki keahlian berdagang. Kebutuhan di desa mencukupi sebagian besar kebutuhan hidupnya.

Orang-orang Cina dan India meninggalkan tanah air mereka dan pergi ke Malaysia dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Banyak diantara mereka yang bersedia mencoba apa saja yang memungkinkan mereka segera menjadi kaya raya. Disamping itu, orang Cina yang ingin berdagang mudah memperoleh bantuan dari organisasi bangsanya dalam bentuk pinjaman modal. Fasilitas seperti itu yang tidak dipunyai oleh orang-orang Melayu. Orang-orang Inggris mendatangkan orang India untuk bekerja di perkebunan mereka dan juga orang-orang Cina untuk bekerja di pertambangan milik mereka. Partisipasi orang Melayu di pedesaan dalam perkebunan dan pertambangan sebagai buruh, tetapi jumlahnya pun sedikit bila dibandingkan Cina dan India. Orang-orang Inggris tidak memperkerjakan orang-orang Melayu karena mereka beranggapan bahwa orang Melayu bukan merupakan buruh yang bisa bekerja keras dan tekun karena ikatan kekeluargaan mereka dengan kampung halamannya terlalu kuat, yang memungkinkan mereka untuk berhenti bekerja dan pulang kerumahnya kapan saja mereka inginkan.<sup>116</sup> Hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh orang-orang Cina dan India karena

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 104

kampung halaman mereka yang jauh. Akhirnya orang-orang Melayu lebih suka bekerja di bidang pemerintahan.

Pemerintah kolonial Inggris pada periode sebelum kemerdekaan telah membantu perkembangan kebijakan pembangunan ekonomi untuk Melayu yang dilalaikan dan membuat mereka tidak bisa bersaing dengan non-Melayu dalam monopoli ekonomi. Dengan monopoli yang sangat kuat dari non-Melayu membuat posisi Melayu berlanjut semakin memburuk dengan sistem ekonomi yang di berlakukan oleh pemerintah kolonial dengan cara urbanisasi dan industrialisasi.<sup>117</sup> Pada masa sebelum kemerdekaan, pemerintah kolonial Inggris tidak hanya memberikan imigran Cina dan India kesempatan penuh dalam kegiatan ekonomi di daerah perkotaan, setelah kemerdekaan mereka diperbolehkan untuk mengambil alih investasi Inggris di Malaysia oleh kolonial Inggris. Kejadian tersebut membuat non-Melayu mengontrol dan mempunyai kekuatan tidak hanya atas kontrak proyek-proyek ekonomi penting di semua sektor, tetapi hampir semua kontrak-kontrak pemerintah yang meliputi jutaan ringgit.<sup>118</sup> Sementara itu Melayu tidak mampu untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka, ketika non-Melayu telah memonopoli sektor ekonomi yang penting di dalam negara.

Perubahan-perubahan yang dilakukan Inggris untuk orang Melayu di pedesaan sebagai akibat tata ekonomi baru, menyangkut keterlibatan mereka dalam pertanian yang menghasilkan barang-barang perdagangan.<sup>119</sup> Misalnya karet yang dapat menghasilkan uang lebih banyak daripada padi. Tetapi tidak seperti padi, karet tidak dapat dimakan sehingga harus dijual. Kemudian uang yang didapat dari penjualan tersebut digunakan untuk membeli makan dan keperluan lainnya.

Dalam perluasan ekonomi di Malaysia pada empat dekade pertama dari abad 20, melayu tetap paling banyak berada di dalam sektor pertanian dan menggantungkan hidupnya dari hasil pertaniannya. Pada saat bersamaan, komunitas utama lainnya di Malaysia seperti orang cina dan India, terlibat dalam perluasan perdagangan, perkebunan dan sektor pertambangan. Kecenderungan ini berlanjut

---

<sup>117</sup> Paridah Abd. Samad, *Op.cit.*, hlm. 63.

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*

terus sampai setelah 1946, membawa kedua komunitas tersebut tidak hanya menguasai bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang politik dan ekonomi.<sup>120</sup>

Malaysia menjadi salah satu penghasil timah terbesar dan hanya kedua di bawah Indonesia dalam hasil karet mentah. Perluasan ekonomi khususnya didalam kedua komoditas tersebut menunjukkan bahwa ekspor Malaysia di tahun 1953 menghasilkan pendapatan nasional. Dari kedua komoditas tersebut, karet yang termasuk paling penting dalam ekonomi Malaysia menempati 65% dari seluruh wilayah penanaman di Malaysia dan telah menyumbangkan 60% dari pendapatan domestik.<sup>121</sup> Ekspor karet dan timah mencapai 890 juta dollar dan 351 juta berturut turut di tahun 1953.<sup>122</sup> labih lanjut orang orang cina dan India lebih menonjol dalam aktivitas yang menguntungkan seperti penanaman karet, pertambangan, industri dan perdagangan, sedangkan peran orang Melayu lebih dalam penanaman padi. Setelah kemerdekaan tahun 1957 dan kekuasaan telah diambil dari Pemerintah kolonial Inggris, terjadi berbagai perubahan politik dan administrasi. Tetapi perubahan ekonomi sedikit sekali. Sistem ekonomi yang digunakan Inggris tetap dijalankan seperti biasanya. Perkebunan perkebunan, pertambangan – pertambangan dan perdagangan yang dimiliki oleh orang orang inggris tetap dipegang mereka.

Orang orang Melayu tetap memusatkan kegiatan mereka dalam pertanian di daerah pedesaan. Banyak kegiatan di bidang perkebunan, pertambangan dan perdagangan dimulai dan berkembang di negara-negara bagian, terutama di Perak dan Selangor. Meskipun perdagangan dalam jumlah besar dilakukan melalui Penang dan karet dalam jumlah besar ditanam di Johor, tetapi di negara-negara bagian Malaysia, pertanian tetap paling dominan, terutama padi.

Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi pemerintah Malaysia setelah merdeka. Kemiskinan lebih parah terjadi di desa desa, yang berarti juga bahwa kemiskinan tersebut terjadi di kalangan orang Melayu, karena mayoritas penduduk desa adalah orang orang Melayu (sekitar 67%). Sekitar 74% dari seluruh

---

<sup>120</sup> *Ibid..*

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Paridah Abd. Samad, *Ibid.*

jumlah orang Melayu hidup dalam garis kemiskinan,<sup>123</sup> tanpa mengingkari selain orang Melayu di pedesaan juga terdapat non Melayu yang banyak di antaranya juga miskin. Tetapi jumlah mereka lebih sedikit bila dibandingkan dengan orang Melayu.

Sebelum pembentukan Malaysia pada tahun 1963, tidak ada rencana ekonomi yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Sistem ekonomi yang digunakan adalah kapitalisme atau perdagangan bebas. Sistem ekonomi tersebut merupakan perpanjangan ekonomi yang diperkenalkan oleh Inggris dan berdasarkan eksploitasi timah, produksi karet dan komoditas utama lainnya untuk ekspor dengan tanaman beras untuk konsumsi domestik.

Ketika Malaysia menjalani proses modernisasi pada periode sebelum kemerdekaan, banyak kejadian yang terjadi dalam bidang ekonomi yang tidak diberitahukan kepada orang-orang Melayu di pedesaan oleh pemerintah Kolonial Inggris, sehingga mereka tidak tahu tentang kejadian – kejadian yang telah terjadi di Malaysia.<sup>124</sup> Orang-orang Melayu pedesaan dianjurkan untuk melanjutkan kehidupannya di desa yang sebagian besar mencari ikan dan bertani.

Sebagai petani dan nelayan, orang-orang Melayu pedesaan sebagian besar bergantung kepada makelar atau perantara untuk memasarkan produk mereka. Disamping itu mereka juga bergantung kepada lintah darat untuk meminjam uang jika mereka berada dalam kesulitan keuangan dan bergantung juga kepada tuan tanah jika mereka tidak memiliki tanah. Semuanya itu melemahkan posisi Melayu dan membuat mereka mudah dimanfaatkan. Lintah darat, tuan tanah dan makelar menjadi sangat berkuasa untuk menentukan tingkat pinjaman, keuntungan dan bunga. Situasi ini lebih lanjut ditekankan dengan distribusi/penyebaran jumlah penduduk, dengan setiap kelompok berkonsentrasi di daerah-daerah khusus. Orang Melayu sebagian besar secara ekonomi kurang berkembang berada di Pahang sebesar 61.2%, Perlis sebesar 79.4%, Kedah sebesar 70.7%, Kelantan sebesar 92.8% dan Trengganu sebesar 93.9%.

---

<sup>123</sup> S. Husin Ali, *Op.Cit.*

<sup>124</sup> *Ibid.*

orang orang Cina berkonsentrasi dipusat kota Penang sebesar 56.1%, Perak sebanyak 42.5% dan Selangor sebanyak 46.3%.<sup>125</sup>

Walaupun pemerintah Malaysia telah mengeluarkan banyak biaya untuk perkembangan pertanian di daerah pedesaan, aktivitas tuan tanah, lintah darat, dan makelar telah memeras keuntungan dari orang orang desa dan tidak membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah Malaysia mulai melaksanakan program pembangunan ekonomi untuk daerah semenanjung di awal 1950, yaitu 2 buah rencana pembangunan 5 tahun yang berakhir pada tahun 1960 dan telah gagal untuk menghasilkan kemajuan kecil dalam kehidupan Melayu.<sup>126</sup> Dalam kondisi depresi ekonomi orang orang desa mudah terpengaruh dan di manfaatkan oleh oportunistis – oportunistis politik. Generasi orang Melayu yang lebih muda memilih untuk pindah ke kota. Hampir semua sektor ekonomi di kota di monopoli oleh orang non Melayu, orang orang desa yang tidak berpendidikan, yang pindah ke kota tidak mempunyai kesempatan dalam bisnis.

Melihat dari rendahnya pendidikan mereka, kondisi ekonomi mereka tidak dapat bertambah baik ketika mereka hanya bisa menjadi buruh dan pekerja yang berpendapatan rendah, tetapi meskipun banyak orang melayu yang hidup miskin, begitu juga dengan orang orang Cina tidak semua kaya tetapi dibandingkan dengan orang Melayu, orang Cina tetap lebih kaya. Orang Melayu tidak mempunyai kekuatan ekonomi di negerinya sendiri, yang mereka punya adalah kepemilikan ladang padi dan kepemilikan perkebunan karet di pedesaan.

### III.2. First Malaysian Plan

Pemerintah Malaysia mengeluarkan *First Malaysian plan* yang berlangsung antara tahun 1966 – 1970 merupakan sebuah rencana pembangunan dan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah Malaysia. Rancangan ekonomi tersebut adalah rancangan pertama yang diperuntukkan bagi seluruh Malaysia. Sebelumnya sudah

<sup>125</sup> S. Husin Ali, *Ibid.*

<sup>126</sup> Fauziah Saffie dan Ruslan Zainuddin, *Sejarah Malaysia* (Selangor:Fajar Bakti SDN. BHD, 2002), hlm. 534

ada rencana pembangunan, seperti *First Malayan Five Year Plan* dan *Second Malayan Five Year Plan*, tetapi rencana tersebut tidak sempurna karena hanya diperuntukan bagi daerah semenanjung Malaysia saja, Sabah dan Sarawak tidak termasuk ke dalam rencana tersebut.<sup>127</sup>

Sasaran utama dari *First Malaysia Plan* adalah untuk memajukan kesejahteraan semua rakyat Malaysia, dan memperbaiki kondisi kehidupan di daerah pedesaan, khususnya diantara kelompok-kelompok yang mempunyai pendapatan rendah.<sup>128</sup> Rencana tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses atau jalan masuk fasilitas kesehatan di daerah pedesaan melalui pembentukan pelaksana kesehatan di pedesaan. Fasilitas pelayanan pedesaan juga didirikan di daerah perkotaan dan dengan berakhirnya rencana ekonomi itu jurang pemisah/perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam bidang kualitas kesehatan semakin sempit/kecil tapi belum sepenuhnya terhapus di Malaysia timur (Sabah dan Sarawak). Fasilitas kesehatan belum terlengkapi dengan baik dibandingkan dengan Malaysia bagian barat (semananjung Malaysia).

Lebih dari 470,8 juta dolar Malaysia dialokasikan untuk pendidikan dibawah *First Malaysia Plan*.<sup>129</sup> Lebih dari 70 % dari alokasi tersebut digunakan khusus untuk pelatihan guru dan tehnik pendidikan yang telah ditaksir terlalu tinggi. Antara tahun 1952 dan 1970 tingkat melek huruf nasional telah meningkat dari 50 % menjadi 59 %.<sup>130</sup> Sesaat sebelum pelaksanaan *First Malaysia Plan*, Inggris mengumumkan mereka akan menarik penjagaan dan komitmen ekonomi mereka kepada Malaysia. Sebagai akibatnya pemerintah Malaysia meminta bantuan dari Amerika Serikat untuk menghindari pincangnya rencana ekonomi tersebut karena kekurangan pembiayaan.

*First Malaysia Plan* juga bertujuan mengatasi masalah pengangguran yang pertama kali diangkat pada tahun 1960, walaupun pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Product*) semakin baik, tetapi tingkat pekerja tidak tumbuh dengan

---

<sup>127</sup> [www.wikipedia.com/first\\_malaysian\\_plan](http://www.wikipedia.com/first_malaysian_plan), diunduh pada 5 oktober 2007 21:00 WIB

<sup>128</sup> Fauziah Saffie dan Ruslan Zainuddin, *Op.Cit.*, hlm. 538

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> [www.wikipedia.com/first\\_malaysian\\_plan](http://www.wikipedia.com/first_malaysian_plan), *Op.Cit.*

sepadan<sup>131</sup>. Terdapat pula persoalan dan spesialisasi etnis dalam berbagai profesi dengan dominasi orang Cina dalam perdagangan, dominasi orang Melayu dalam pelayanan umum dan orang India sebagian besar berpartisipasi dalam profesi spesialisasi seperti hukum. Perbedaan pendapat antara pedesaan dan perkotaan yang coba dipecahkan juga tidak terhapus dengan mudah.

Di pedesaan, pusat daerah pertanian, pemerintah melanjutkan pembangunan yang telah dijalankan sebelumnya dengan melalui *First Malaysia Five Year Plan*. Selama masa *First Malaysian plan*, lebih dari 40.000 Ha (sekitar 160 Km<sup>2</sup>) dan tanaman lain di Malaysia diairi.<sup>132</sup> Pemerintah juga menanam kembali ratusan sampai ribuan pohon karet untuk meningkatkan hasil karet; di Malaysia Barat sendiri 304.000 Ha (±1230 Km<sup>2</sup>) dari perkebunan ditanam kembali.<sup>133</sup> Pemerintah juga mencoba untuk merehabilitasi perkebunan kelapa yang tidak efisien, memodernisasi metode penangkapan ikan dan menyediakan bantuan untuk petani petani unggas dan peternakan. Pemerintah juga berusaha untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Malaysia sejak dahulu pada karet, mengembangkan penanaman kelapa sawit di Malaysia barat dan mengembangkan industri kayu di Sabah.

Pemerintah juga memberikan pendorong untuk memajukan ekonomi Malaysia di bidang industri dengan memajukan pengusaha Melayu dan menaikkan keahlian pengelolaan melayu untuk spekulasi industri. *Federal Industrial Development Authority* (FDA), didirikan pada 1965 tetapi memulai operasinya pada tahun 1967, mencoba untuk mempercepat perkembangan industri lebih lanjut. Rencana ambisius pemerintah untuk meningkatkan standar hidup dalam daerah pedesaan, investasi terbatas dalam modal social, walaupun rencana pengembangan bermacam macam telah gagal untuk membendung pasang surut migrasi dari pedesaan ke kota atau menaikkan pendapatan keluarga keluarga dipedesaan. Di Malaysia Barat 90% dari semua rumah tangga memperoleh lebih dari M\$ 100 per bulan yang berlokasi di daerah pedesaan. Mayoritas paling banyak adalah rumah tangga Melayu.<sup>134</sup>

---

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.*

### III.3. National Operations Council (NOC)

*National Operations Council* (NOC) merupakan pemerintahan darurat yang dibentuk oleh Tunku Abdul Rahman. NOC dibentuk setelah kerusuhan anti-Cina 13 Mei 1969.<sup>135</sup> Pemerintahan darurat tersebut dipimpin oleh Tun Abdul Razak, dan bertanggung jawab langsung kepada Tunku yang tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia. NOC mempunyai kekuasaan Legislatif untuk menjalankan pemerintahan. Anggota NOC terdiri atas enam orang Melayu dan dua orang merupakan orang non-Melayu. Anggota NOC yang merupakan orang Melayu adalah Tun Dr. Ismail, Dato Hamzah Abu Samah, Dato Sri Ghazalie Shafie, Tan Sri Abdul Kadir Shamsuddin, Jeneral Tengku Osman Jawa, Tan Sri Muhammad Salleh. Dua orang anggota lainnya yang merupakan orang non-Melayu adalah Tun Taw Siew Sin, presiden dari MCA dan Tun VT. Sambathan, presiden dari MIC. Dewan anggota NOC terdiri dari Kepala polisi, angkatan bersenjata, pegawai negeri pejabat public dan asing serta beberapa pemimpin politik penting di Malaysia.

Tugas NOC adalah memulihkan keadaan Malaysia, seperti memperbaiki tata tertib perundangan untuk memperbaiki kembali harmoni dan kepercayaan diantara berbagai ras yang ada di Malaysia, khususnya antara orang-orang Melayu dan Cina yang menjadi pelaku langsung Peristiwa 13 Mei. NOC mengumumkan tentang peristiwa kerusuhan rasial pada 19 Oktober 1969.<sup>136</sup> Pengumuman tersebut menyinggung keberadaan *Partai Komunis Malaya* (CPM) dan *Kongsi Gelap* Cina. Selain itu laporan NOC juga menyinggung masalah yang menjadi pemicu terjadinya kerusuhan anti-Cina 13 Mei, yang termasuk diantaranya adalah perbedaan interpretasi mengenai konstitusi Malaysia yang terjadi antara orang Melayu dan Cina. *Polarisasi* etnis dan rasa permusuhan antara kedua etnis tersebut juga menjadi pemicu, dengan kata lain orang Melayu dan Cina tidak dapat hidup berdampingan dengan baik disebabkan perasaan Melayu yang merasa dirugikan secara ekonomi bila dibandingkan dengan orang-orang Cina.<sup>137</sup>

<sup>135</sup> Paridah Abd. Samad, *Op.Cit.*, hlm. 83

<sup>136</sup> Leon Comber, *Ibid.*

<sup>137</sup> Paridah Abd. Samad, *Op.Cit.*, hlm. 83

Dampak kerusuhan tersebut besar sekali bagi masyarakat Malaysia. Kemudian untuk membentuk Negara Malaysia yang bersatu. Pemerintahan darurat (NOC) mengambil tindakan dengan memusatkan perhatian mereka pada masalah kesatuan nasional. Dewan tersebut bertugas untuk menyelidiki sebab-sebab terjadinya kerusuhan dan mendiskusikan masalah yang mempengaruhi kesatuan nasional. Hal tersebut dilakukan agar kerusuhan yang sama tidak akan terjadi lagi dan dapat tercipta ketentraman di Malaysia pada masa yang akan datang. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan membentuk departemen persatuan Negara pada bulan juli 1969 bertujuan untuk merumuskan satu ideologi kebangsaan dan juga untuk menyusun program sosial dan ekonomi yang baru. Pada 31 Agustus 1970 yang merupakan hari kemerdekaan Malaysia, diumumkan secara resmi ideologi baru di Malaysia yang disebut Rukun Negara. Rukun Negara bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bertoleransi, bersatu padu, progresif dan menghargai proses demokrasi. Pemerintah Malaysia bermaksud menjadikan rukun Negara sebagai dasar dalam kesatuan nasional dan untuk mengikat masyarakat dalam didalam masyarakat yang majemuk. Rukunegara mempunyai lima prinsip yaitu, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, loyalitas kepada Raja dan Negara, menjunjung tinggi konstitusi, *rule of law*, moralitas dan prilaku yang terpuji.<sup>138</sup>

#### **III.4. New Economic Policy (kebijakan Ekonomi Baru)**

NOC mengeluarkan kebijakan yang disebut sebagai kebijakan ekonomi baru yang sarasanya untuk membasmi kemiskinan di Malaysia melalui perkembangan ekonomi yang cepat, yang akan mengurangi peranan non melayu dalam bidang ekonomi. Kebijakan tersebut juga merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia dalam mencapai kesatuan nasional.<sup>139</sup>

Kebijakan tersebut sebagai harapan untuk menghindari pecahnya lagi kekerasan yang sama seperti kerusuhan rasial mei 1969 di masa yang akan datang.

<sup>138</sup> Syamsul Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 133

<sup>139</sup> R.S Milne. "The Politics of Malaysia's New Economic Policy", *Pacific Affairs*, Vol 49, No. 2, Summer 1976, hlm. 235.

Setelah peristiwa Mei 1969 intensitas dan kesempatan untuk orang Melayu melalui kebijakan ekonomi baru berubah secara drastis. Kebijakan ekonomi baru muncul dan ditampilkan sebagai kesempatan terakhir orang Melayu untuk meningkatkan posisi ekonomi di dalam pemerintahan. Pembangunan di pedesaan dilanjutkan sebagai bantuan ekonomi secara besar-besaran terhadap orang-orang Melayu. Beberapa daerah yang sebelumnya adalah daerah pedesaan dibangun menjadi pusat-pusat kota baru.

Kebijakan ekonomi baru, dalam usahanya hendak memenuhi tuntutan orang Melayu yang lebih mendesak untuk mengurangi perbedaan ekonomi di antara orang Melayu dan Cina. Kebijakan tersebut juga merupakan kebijakan yang didasarkan atas perluasan ekonomi secara cepat yang menawarkan semua kesempatan ekonomi yang ada untuk semua masyarakat Malaysia. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, pemerintah menjamin bahwa tidak akan ada kelompok manapun yang mengalami kerugian dan kehilangan.<sup>140</sup> Langkah pertama dari kebijakan tersebut melalui pelaksanaan sebuah rancangan yang dinamakan *The second Malaysian plan* (SMP) tahun 1971 – 1975 merupakan langkah pertama dari rancangan pembangunan dalam kebijakan ekonomi baru dirancang untuk mencapai sasaran kesatuan nasional dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan langsung mengurangi kemiskinan yang pada akhirnya bertujuan untuk membasmi kemiskinan seluruh orang Malaysia, apapun rasnya. Sasaran lainnya adalah untuk mempercepat proses dan mengatur kembali masyarakat untuk memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi agar mengurangi dan akhirnya menghapus identifikasi ras.<sup>141</sup>

Dua sasaran dari *Second Malaysian Plan* satu sama lainnya saling berhubungan contohnya adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menaikkan pendapatan di wilayah pedesaan, dimana banyak tinggal orang Melayu.<sup>142</sup> Sasaran tersebut tidak hanya ditujukan untuk membasmi kemiskinan, tetapi juga untuk memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi antar ras dengan meningkatkan

---

<sup>140</sup> Pemerintah Malaysia, *The Second Malaysian plan 1971-1975*, (Kuala Lumpur: Government Press, 1971), hlm. 1

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> *Ibid.*, hlm. 3

partisipasi Melayu dan masyarakat lainnya. Partisipasi Melayu dan masyarakat lainnya dalam aktivitas perkotaan dimaksudkan untuk membasmi kemiskinan dengan menyediakan lapangan-lapangan kerja baru.

*SMP* merupakan lanjutan dari *First Malaysian Plan* yang berlangsung antara 1965-1970, yang juga mengkhususkan untuk mengatasi masalah kemiskinan di antara masyarakat Malaysia walaupun hasilnya tidak begitu baik. Di Malaysia kemiskinan banyak terjadi di wilayah pedesaan tempat orang Melayu tinggal. Melayu merupakan penduduk mayoritas di Malaysia, tetapi kekuatan ekonomi mereka sangat kurang bila dibandingkan dengan orang-orang Cina. Pada tahun 1970 orang Melayu dan Bumiputera yang merupakan penduduk asli Malaysia hanya mengontrol 1,9% dalam kehidupan ekonomi di Malaysia.<sup>143</sup> Sedangkan orang-orang non-Melayu, khususnya orang Cina memegang 37,4% dan sisanya dipegang oleh pihak asing.<sup>144</sup> Kemudian sesuai dengan pasal 153 dari konstitusi Malaysia, pemerintah menentukan kuota dalam pemberian beasiswa pendidikan, pekerjaan di bidang pemerintahan kepada orang-orang Melayu untuk meningkatkan status ekonomi orang-orang Melayu.

*SMP* yang merupakan langkah pertama Pemerintah Malaysia dalam bidang ekonomi setelah kerusuhan 13 Mei, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepentingan ekonomi Melayu.<sup>145</sup> Peningkatan ekonomi Melayu tersebut dikhususkan di wilayah pertambangan dan Industri. Sekitar 7,25 trilyun dollar Malaysia dialokasikan untuk *SMP*. Rancangan tersebut diharapkan untuk dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan peran serta Melayu dalam sektor swasta. Pemerintah juga mengeluarkan beberapa batasan yang akan menguntungkan ekonomi Melayu.

Menurut *Second Malaysian Plan* sasaran pertamanya adalah mengurangi kemiskinan yang pada akhirnya bertujuan untuk membasmi kemiskinan seluruh orang Malaysia, apapun rasnya. Kemiskinan yang harus dibasmi tersebut berkaitan dengan pengangguraan, pekerja-pekerja yang tenaganya tidak digunakan sepenuhnya dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan yang daya pengeluarannya rendah.

---

<sup>143</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/second\\_malaysian\\_plan](http://en.wikipedia.org/wiki/second_malaysian_plan), diambil pada 29 Oktober 2008 15:00 WIB

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> *Ibid.*

Untuk menyelesaikan masalah tersebut menurut *SMP* dengan cara menaikkan pendapatan dan memperbanyak lapangan-lapangan pekerjaan.<sup>146</sup>

Berkaitan dengan usaha menaikkan pendapatan terdapat dua cara melaksanakannya, yaitu pertama melalui penggunaan teknologi modern dan kemudahan-kemudahan lainnya. Kedua melalui pergantian lapangan kegiatan. Kelompok yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan rencana tersebut adalah orang yang terlibat dengan kegiatan yang pengeluarannya rendah.<sup>147</sup> *SMP* berpendapat penggunaan tehnik-tehnik baru dan kemudahan-kemudahan yang lebih baik sudah pasti akan menambah daya pengeluaran sekaligus meningkatkan pendapatan mereka yang pada akhirnya dapat membasmi kemiskinan. Penggunaan tehnik-tehnik baru yang disebutkan di atas berkaitan dengan teknologi modern dalam bidang pertanian. Misalnya di bidang penanaman padi, sistem irigasi yang efisien dan penanaman padi dua kali setahun dengan menggunakan tehnik-tehnik baru.<sup>148</sup>

Kemudahan-kemudahan yang dimaksudkan untuk menaikkan pendapatan adalah kemudahan dalam pemasaran, kredit dan pinjaman.<sup>149</sup> Untuk melaksanakan tujuan tersebut didirikan beberapa lembaga, yaitu FAMA (*Federal Agricultural Marketing Authority*) agar lebih memudahkan dalam memasarkan hasil-hasil pertanian. Sedangkan untuk memberikan kemudahan kredit didirikan Bank Pertanian pada tahun 1969. langkah langkah tersebut dan pelaksanaannya ditujukan bagi para petani-petani miskin yang kebanyakan terdiri dari orang Melayu, pemilik perkebunan kecil Kelapa dan Karet, serta para penyewa-penyewa tanah.<sup>150</sup> Diharapkan dengan langkah tersebut dan pelaksanaannya dapat meningkatkan daya pengeluaran serta meningkatkan pendapatan mereka. Menurut *SMP* apabila pendapatan-pendapatan petani meningkat maka kemiskinan akan berkurang dan kemudian seterusnya dapat dibasmi.

<sup>146</sup>Shamsul Amri Baharuddin, *RMK Tujuan dan Pelaksanaannya satu penilaian teoritis* (Kuala Lumpur:Percetakan Dewan bahasa dan Pustaka, 1977), hlm. 33

<sup>147</sup> Pemerintah Malaysia, *Op.Cit.*, hlm. 5

<sup>148</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm. 135

<sup>150</sup> Shamsul Amri Baharuddin, *Op.Cit.*, hlm. 36

Selain penggunaan teknologi modern dan kemudahan-kemudahan lainnya pemberantasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara pergantian lapangan pekerjaan dari sektor yang daya pengeluarannya rendah ke pekerjaan di sektor yang daya pengeluarannya lebih tinggi. Dalam pergantian lapangan pekerjaan ada beberapa langkah yang dikemukakan oleh *SMP* seperti rancangan pembangunan tanah, proyek-proyek perikanan, pemodernisasi kehutanan, perdagangan, perindustrian, mengadakan bantuan keuangan, peluang-peluang mendapatkan pelajaran dan pelatihan serta susunan-susunan organisasi yang perlu untuk memudahkan pergantian dalam lapangan-lapangan kegiatan yang lebih modern.<sup>151</sup> Dari rancangan tersebut yang paling diperhatikan adalah rancangan pembangunan tanah. Sebanyak 908.65 juta dollar Malaysia dikeluarkan untuk rancangan tersebut.<sup>152</sup> Rancangan pembangunan tanah ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam *SMP* seperti yang sudah disebutkan pengangguran dan penggunaan tenaga kerja yang tidak penuh dianggap sebagai faktor yang sangat berkaitan dengan kemiskinan.<sup>153</sup> Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka dilakukan usaha memperbanyak lapangan-lapangan pekerjaan baru yang dijadikan salah satu tujuan dalam membasmi kemiskinan di Malaysia. Penyediaan lapangan-lapangan kerja baru khususnya untuk para kaum muda dari semua etnis supaya menambah tenaga kerja produktif.<sup>154</sup>

Ada beberapa strategi untuk menyelesaikan masalah ini yaitu, pertama mengontrol pertumbuhan penduduk melalui rancangan keluarga berencana. Kedua melalui perubahan-perubahan besar dalam susunan ekonomi.<sup>155</sup> Maksud perubahan besar adalah meluaskan lapangan pekerjaan kemudian dengan perluasan lapangan pekerjaan juga direncanakan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pekerja. Rencana-rencana tersebut akan dilakukan melalui rencana investasi dari dalam

---

<sup>151</sup> Pemerintah Malaysia, *Op.Cit.*, hlm. 5

<sup>152</sup> Shamsul Amri Baharuddin, *Op.Cit.*, hlm. 60

<sup>153</sup> *Op.Cit.*

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> Pemerintah Malaysia, *Ibid.*, hlm. 6

maupun luar negeri di sektor swasta maupun sektor negeri. Jenis pekerjaan yang akan dijalankan dari investasi tersebut yang akan memerlukan pengambilan tenaga buruh yang banyak.<sup>156</sup>

Menurut *SMP* Harapan untuk memperbanyak lapangan pekerjaan ditumpukan pada investor yang melakukan investasi di sektor swasta dan negeri untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan tenaga kerja tidak penuh. Tetapi perhatian utama diberikan kepada peranan sektor swasta, khususnya investor-investor asing, karena menurut *SMP* keberhasilan rencananya tergantung pada sektor tersebut.<sup>157</sup> Jadi tidak mengherankan kalau terdapat 62% dari modal saham perusahaan-perusahaan yang menjalankan perdagangan di Semenanjung adalah kepunyaan perusahaan asing yang hanya cabang-cabangnya saja yang terdapat di Malaysia.

Sasaran kedua *SMP* adalah mengatur kembali masyarakat untuk memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi agar mengurangi dan akhirnya menghapus identifikasi ras. Keinginan untuk mengatur kembali masyarakat muncul sebagai usaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang tidak seimbang antara Melayu dan non-Melayu khususnya Cina. Menurut *SMP* ada tiga aspek dalam ketidakseimbangan dari segi pendapatan. Sektor yang paling rendah pendapatannya adalah sektor tradisional atau pedesaan. Terdapat perbedaan pendapatan antara sektor pedesaan dan perkotaan, selain perbedaan pendapatan antar sektor juga terdapat perbedaan pendapat antar etnis, antara etnis Melayu dan non-Melayu.<sup>158</sup> Perbedaan jelas terdapat dalam sektor pedesaan yang sebagian besar penduduknya adalah orang Melayu. Orang-orang non-melayu khususnya Cina banyak terdapat di sektor perkotaan.

Aspek yang kedua dari segi tenaga kerja, terdapat ketidakseimbangan. Orang Melayu yang terdapat di sektor pedesaan jumlahnya tiga kali lebih banyak daripada non-Melayu.<sup>159</sup> Sebagian besar orang Melayu menjalankan kegiatan ekonomi yang berpendapatan rendah seperti menanam padi, menangkap ikan dan menoreh getah. Sering juga mereka menjadi tenaga-tenaga kerja tidak penuh yang mengakibatkan

---

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid.*, hlm. 93

<sup>158</sup> Shamsul Amri Baharuddin, *Op.Cit.*, hlm. 117

<sup>159</sup> *Ibid.*

pengangguran tak kentara, jadi didapati Melayu melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian. Sedangkan orang non Melayu terdapat dalam sektor modern di perkotaan dan di pedesaan. Pekerjaan yang dilakukan oleh mereka sebagai pekerja pertambangan, pekerja di restoran, menjalankan perusahaan dan juga terlibat dalam pertanian modern dan pekerjaan lainnya di bidang teknik.

Aspek ketiga, terdapat ketidakseimbangan hak milik, penguasaan kekayaan. Misalnya sebagian besar sawah padi yang dikerjakan oleh orang Melayu adalah tanah sewaan. Di Malaysia tanah yang luasnya 4,2 juta ekar ditanami dengan tanaman karet. Sekitar 37% nya dimiliki oleh orang Melayu, 42 % oleh orang non-Melayu dan sisanya sebanyak 21% dimiliki oleh orang asing.<sup>160</sup> Tidak terdapat orang Melayu yang memiliki Perkebunan karet yang luasnya melebihi 100 ekar, begitu juga dengan penguasaan dalam perkebunan Kelapa Sawit. Maka dari itu dalam *SMP* orang-orang yang terdapat dalam sektor pedesaan yang hidup dalam kemiskinan harus dilengkapi dengan pelatihan-pelatihan agar dapat memperbaiki kehidupan ekonomi mereka.

Hasil utama pembangunan ekonomi adalah pendapatan yang meningkat, yang harus dilakukan secara adil menjadi tujuan utama *SMP* dalam mencapai sasarannya untuk menyeimbangkan ekonomi di Malaysia. Misalnya jika selama ini orang-orang non-Melayu dan orang-orang asing menguasai sektor-sektor perdagangan dan perindustrian, maka dalam pelaksanaan *SMP*, sekarang saatnya orang-orang Melayu diberi peluang melibatkan diri dalam bidang-bidang tersebut. Pemerintah menetapkan dalam tempo 20 tahun bahwa orang-orang Melayu akan menjalankan dan memiliki sekurang-kurangnya 30% dari aktivitas perdagangan dan perindustrian.<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup> Pemerintah Malaysia, Op.Cit., hlm. 45

<sup>161</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI BARU

#### IV.1. Hasil dari Second Malaysian Plan

*Second Malaysian Plan* (SMP) yang berlangsung dari tahun 1971-1975 merupakan langkah pertama dari Kebijakan Ekonomi Baru (*New Economic Policy*). Selama periode SMP ini pertumbuhan ekonomi Malaysia meningkat dari periode sebelumnya yaitu sebesar 7,45% setahun.<sup>162</sup> Namun upaya memberantas kemiskinan masih berjalan lambat. Usaha-usaha yang dilakukan dalam wilayah pedesaan masih bertumpu kepada pengembangan tanah, parit dan sistem irigasi yang lebih baik untuk meluaskan penanaman padi, tanpa memberi perhatian kepada asal muasal terjadinya kemiskinan di wilayah pedesaan.

SMP mempunyai dua sasaran yaitu mengurangi kemiskinan yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan seluruh orang Malaysia, apapun rasnya. pemberantasan kemiskinan dilakukan dengan cara menaikkan tingkat pendapatan dan memperbanyak lapangan-lapangan pekerjaan untuk seluruh masyarakat Malaysia apapun rasnya. Upaya Pemerintah untuk memberantas kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dipusatkan pada wilayah pedesaan. Wilayah Pedesaan merupakan tempat tinggal sebagian besar dari orang Melayu yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani, nelayan dan buruh perkebunan Karet. Petani-petani yang tinggal di daerah pedesaan banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk yang hidup miskin di sektor pertanian di pedesaan sebanyak 68,3% dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggal di luar wilayah pedesaan sebanyak 27,8%.<sup>163</sup> Karena banyaknya penduduk yang hidup miskin di wilayah pedesaan maka, SMP menitikberatkan wilayah tersebut sebagai perhatian utamanya dalam memberantas kemiskinan.

Upaya untuk meningkatkan bidang pertanian dilakukan antara lain dengan membentuk badan-badan yang berfungsi memasarkan hasil-hasil pertanian dan

---

<sup>162</sup> Barbara Watson dan Leonard Andaya, *Op.Cit.*, hlm. 332

<sup>163</sup> David Lim, *Further Readings on Malaysian economic Development* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1983). Hlm. 6

kemudahan bagi petani untuk mendapatkan kredit. Penanaman padi di wilayah Semenanjung Malaysia merupakan aktivitas pertanian yang sama pentingnya dengan penanaman karet. Hal tersebut berdasarkan dengan pola penggunaan tanah di Semenanjung pada akhir tahun 1970, 30% dari seluruh tanah persawahan di Semenanjung ditanami padi dua kali dalam setahunnya. Namun langkah-langkah yang dijalankan SMP tersebut tidak begitu berhasil.<sup>164</sup>

Langkah-langkah yang dijalankan dalam SMP untuk memberantas kemiskinan memang tidak begitu berhasil. Karena yang ditekankan dalam pelaksanaannya adalah faktor-faktor dari teknologi tradisional dan tanah yang kurang ekonomis sebagai puncak kemiskinan petani. Langkah-langkah tersebut kurang menyentuh sebagian faktor yang berhubungan dengan aspek pengeluaran.<sup>165</sup> Ada faktor yang lebih penting yaitu, pemilikan dan penguasaan tanah oleh tuan-tuan tanah menyebabkan banyak petani yang tidak memiliki tanah dan mengerjakan menanam padi dengan menyewa tanah. Selain itu juga terdapat penindasan oleh para perantara dan makelar kepada para petani.

Program untuk memberantas kemiskinan di wilayah perkotaan sangat bergantung pada program pemberantasan kemiskinan di wilayah pedesaan.<sup>166</sup> Kegagalan yang terjadi di wilayah pedesaan lebih lanjut memperbesar jurang pemisah antara perkotaan dan pedesaan. Arus urbanisasi dari pedesaan meningkat karena banyak penduduk desa yang mencari pekerjaan di kota. Perluasan pekerjaan di kota tidak bisa mengurangi arus urbanisasi dan kemudian tidak bisa pula mengurangi kemiskinan di perkotaan. Walaupun program-program di pedesaan tidak begitu berhasil, tetapi sekitar 1 juta ekar tanah telah dikembangkan.<sup>167</sup>

Cara lain untuk menaikkan pendapatan adalah dengan cara memperbanyak kesempatan-kesempatan kerja. Kebanyakan pekerjaan di bidang industri diisi oleh orang-orang Cina.<sup>168</sup> Hal tersebut disebabkan metode perekrutan pekerjaan, yang

---

<sup>164</sup> Shamsul Amri Baharuddin, *Op.Cit.*, hlm 40

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> David Lim, *Op.Cit.*, hlm. 8

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> Paridah Abd. Samad, *Op.Cit.*, hlm 106

berdasarkan kekeluargaan. Kebanyakan perusahaan industri milik orang Cina merupakan perusahaan keluarga dan biasanya hanya yang termasuk dalam keluarga saja yang bekerja di perusahaan itu. Selain itu orang Melayu kekurangan kemampuan, pelatihan dan bakat dalam bidang pekerjaan industri di perkotaan. Maka pemerintah pun berusaha mendirikan sektor-sektor swasta dalam industrialisasi yang ditujukan untuk memperbaiki ekonomi Melayu.

Pemerintah juga menggiatkan para investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk melakukan investasi di sektor-sektor swasta ataupun negeri, untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan tenaga kerja tidak penuh. Sebanyak 60 ribu pekerjaan baru telah tercipta. Pada tahun 1974 pertumbuhan lapangan-lapangan kerja menurun sebesar 3% dari jumlah tahun sebelumnya yang sebesar 5%.<sup>169</sup> Jumlah pengangguran pada tahun 1975 menjadi 7,4% hal tersebut disebabkan pemasukan tenaga buruh yang meningkat dari 4,16 juta tahun 1974 menjadi 4,23 juta di tahun 1975.<sup>170</sup> Selama 5 tahun Pelaksanaan SMP sebanyak 592 ribu pekerjaan baru telah tercipta, tetapi jumlah tersebut tidak mencapai target dari SMP sebanyak 600 ribu lapangan pekerjaan.<sup>171</sup> Dilihat dari hasil tersebut langkah-langkah yang dilakukan SMP dalam menyelesaikan pengangguran yang juga berkaitan dengan kemiskinan masih belum tercapai, walaupun banyak lapangan pekerjaan baru tercipta. Hal itu dikarenakan jumlah tenaga kerja baru dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga menyebabkan jumlah pengangguran tidak banyak berubah.

Sasaran kedua SMP adalah mengatur kembali masyarakat untuk memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi agar mengurangi dan menghapus identifikasi ras. Strategi yang dilakukan pemerintah dalam SMP untuk mencapai keseimbangan ekonomi di Malaysia adalah pertama menyinggung tentang memodernisasi sektor pedesaan yang melibatkan kemajuan teknologi. Strategi tersebut dikhususkan pada sektor pertanian yang merupakan tempat tinggal dari sebagian orang Melayu yang terlibat dalam kegiatan yang pengeluarannya rendah.<sup>172</sup> Disamping itu pula

---

<sup>169</sup> Shamsul Amri Baharuddin, *Op.Cit.*, hlm. 106

<sup>170</sup> *Ibid.*

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> Shamsul Amri Baharuddin, *Ibid*, hlm. 121

meningkatkan fasilitas kesehatan, infrastruktur dan lain-lain guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Termasuk mengganti lapangan pekerjaan untuk para petani ke perkotaan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.

Strategi kedua adalah pendidikan memperbanyak peluang Melayu untuk mengikuti pendidikan sampai perguruan tinggi dengan cara pemberian beasiswa. Menurut SMP langkah itu diperlukan bagi pelajar-pelajar yang kurang mampu dapat mengikuti pelajaran sesuai bakat mereka.<sup>173</sup> Yang ketiga SMP melakukan perpindahan penduduk (urbanisasi) dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan yang tujuannya untuk memperkecil jurang perbedaan ekonomi antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Strategi tersebut dilakukan agar penduduk pedesaan khususnya Melayu bisa melibatkan diri dan menyesuaikan diri dengan kehidupan perkotaan. Kemudian untuk menjalankannya pemerintah menyediakan tempat-tempat berdagang, modal, pelatihan pemasaran dan teknik berdagang.

Selain itu pemerintah juga membentuk badan-badan seperti Majelis Amanah Rakyat (MARA), Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS) dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) untuk membantu Orang Melayu dan kaum bumiputera dalam melaksanakan tujuan tersebut.<sup>174</sup> Kemudian pemerintah juga membentuk masyarakat pengusaha Melayu. Masyarakat pengusaha Melayu merupakan satu bagian penting untuk mencapai keseimbangan ekonomi antar ras di Malaysia.<sup>175</sup> Untuk mempercepat proses tersebut negara memberikan bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha Melayu. Pemerintah membangun toko-toko untuk berdagang bagi orang-orang Melayu di kawasan perkotaan. Peraturan-peraturan tertentu dibuat untuk membentuk kerjasama antara orang Melayu dan non-Melayu khususnya Cina. Hal ini akan memberikan pelatihan dan pengalaman bagi pengusaha-pengusaha Melayu.

MARA yang merupakan badan yang dibentuk pada 1969 berfungsi menyediakan bantuan tehnik dan keuangan kepada pedagang-pedagang Melayu. Selain itu MARA juga bertanggung jawab untuk mendirikan perusahaan dan

---

<sup>173</sup> *Ibid.*.

<sup>174</sup> *Ibid.*, hlm. 122

<sup>175</sup> *Ibid.*

perdagangan yang baru dan kemudian akan diambilalih oleh orang Melayu. Selain MARA dan PERNAS, badan-badan yang didirikan untuk memajukan partisipasi Melayu dalam bidang ekonomi adalah *State Economic Development Corporation* (SEDC), *Urban Development Authority* (UDA) yang didirikan pada 1973 untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada para pengusaha Melayu dikawasan perdagangan yang didominasi oleh orang-orang Cina. FELDA (*Federal land Development Authority*) juga telah mengembangkan banyak lahan pertanian. Lahan yang dikembangkan telah melebihi target yang direncanakan SMP sekitar 412.371 ekar dari target semula 403.000 ekar.<sup>176</sup> Kemiskinan di wilayah pertanian juga mengalami sedikit penurunan dari periode sebelumnya yaitu, dari sebesar 68,8% menjadi 63% pada waktu akhir dari masa SMP.<sup>177</sup>

Perusahaan atau badan milik negara yang paling menonjol adalah PERNAS sebuah badan usaha yang didirikan di akhir tahun 1969 dan mulai mengeluarkan sejumlah besar bantuan dan kerjasama dengan asosiasi perusahaan yang mencakup di berbagai sektor.<sup>178</sup> Badan usaha tersebut memulai usahanya di sektor asuransi dan konstruksi dan kemudian segera meluas dengan melayani kepentingan publik di sektor perdagangan, real estat, pertambangan dan keamanan. PERNAS dan SEDC didirikan dengan tujuan utama untuk mengakumulasikan asset-aset perusahaan, sementara MARA dan UDA dimaksudkan untuk mempromosikan perusahaan-perusahaan swasta Melayu.<sup>179</sup>

Guna meningkatkan kontrol atas swasta, pemerintah juga mengeluarkan banyak peraturan-peraturan baru dalam hubungannya dengan partisipasi ekonomi dari perusahaan-perusahaan non-Melayu. Selain itu Pemerintah juga mendirikan badan-badan baru untuk untuk memonitor dan mempengaruhi sektor swasta. Selain mendirikan badan-badan baru pemerintah juga mengeluarkan sebuah undang-undang yaitu ICA (*Industrial Coordination Act*) pada tahun 1975.<sup>180</sup> ICA merupakan

---

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> Syamsul Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 138

<sup>179</sup> *Ibid.*

<sup>180</sup> *Ibid.*

undang-undang yang menuntut semua perusahaan manufaktur untuk memperoleh izin usaha, kecuali jika modal perusahaan yang bersangkutan kurang dari \$ 100 ribu dan mempunyai karyawan kurang dari 25 orang.<sup>181</sup> Untuk memperoleh lisensi, mereka harus mengambil langkah-langkah yang menjamin bahwa 30% penyertaan saham dimiliki oleh kepentingan etnis Melayu, dan jika merupakan perusahaan asing, 70% saham harus berada di tangan Malaysia.<sup>182</sup> Para pengusaha tersebut juga harus mencari distributor orang Melayu, sehingga sekurang-kurangnya 30% dari distribusi berada ditangan Melayu.<sup>183</sup> Selain itu mereka juga harus merekrut dan memberikan pelatihan kepada para pekerja Melayu, sehingga tenaga kerja yang ada di semua tingkat memperlihatkan posisi komunal penduduk di Malaysia. Maka sudah dapat di simpulkan bahwa tujuan dikeluarkannya undang-undang tersebut untuk memperluas partisipasi ekonomi Melayu di Malaysia.

Walaupun beberapa kemajuan telah dicapai orang-orang Melayu dalam memperbaiki kehidupan ekonominya, tetapi ketidakseimbangan pekerjaan dan kepemilikan di antara Orang Melayu dan non-Melayu yang ada masih tetap serius. Misalnya dalam bidang industri manufaktur, partisipasi Melayu sejumlah 45% dari total pekerjaan yang ada, tetapi sekitar 55% sisanya dari orang Melayu tersebut masih merupakan tenaga yang tidak mempunyai kemampuan. Sedangkan orang-orang Cina 77% terdiri dari kelompok pekerja profesional dan manajerial. 23% sisanya terdiri atas kelompok pekerja tehnik dan pekerja pengawas.<sup>184</sup>

#### **IV.2 Reaksi Masyarakat Malaysia terhadap Kebijakan Ekonomi Baru**

Reaksi paling besar terhadap kebijakan Ekonomi Baru (KEB) datang dari orang-orang Cina, hal itu terjadi pada masa awal pelaksanaan Kebijakan tersebut. KEB menyebabkan banyak orang Cina berimigrasi ke luar negeri. Pebisnis-pebisnis Cina melancarkan protes kepada pemerintah tentang pelaksanaan KEB yang mereka

---

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm. 139

<sup>182</sup> *Ibid.*

<sup>183</sup> *Ibid.*, hlm. 140

<sup>184</sup> Paridah Abd. Samad, *Op.Cit.*, hlm. 117

anggap tidak adil. KEB memperlihatkan kemunculan dari pebisnis-pebisnis baru Melayu dan mulai tumbuhnya kelas menengah Melayu di wilayah perkotaan. Pelaksanaan KEB menyebabkan ketidaknyamanan dan frustrasi diantara investor-investor, khususnya investor Cina. Untuk memperbanyak pekerjaan untuk Melayu, memperluas kesempatan pendidikan Melayu dan menaikkan sejumlah professional Melayu, pemerintah kemudian memberlakukan kuota untuk masuk ke universitas negeri. Kuota tersebut mengurangi bagian dari pelajar-pelajar Cina untuk belajar di Universitas Negeri dan menyebabkan banyak pelajar Cina melanjutkan pendidikannya ke luar negeri.<sup>185</sup>

Ketidakpuasan atas pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Baru menyebabkan orang-orang Cina untuk bermigrasi ke luar negeri, seperti ke Australia, Amerika, Kanada dan Inggris. Kebanyakan dari mereka merupakan pekerja profesional yang berpendapatan tinggi, misalnya dokter dan insinyur. Mereka merasa kecewa karena merasa diperlakukan sebagai masyarakat kelas dua, meskipun mereka telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia.<sup>186</sup>

Dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut, banyak perusahaan milik negara yang memperkerjakan orang-orang Melayu dan perusahaan yang bergerak di sektor swasta juga hanya memperkerjakan orang Melayu untuk mencapai tujuan dari *Second Malaysian Plan*. Keadaan tersebut membuat banyak pekerja-pekerja Cina kehilangan kesempatan untuk bekerja dan hal tersebut membuat mereka marah. Hilangnya kepercayaan orang Cina kepada MCA untuk melindungi hak-hak mereka juga menjadi alasan utama kekecewaan mereka. Kejadian tersebut membuat banyaknya orang Cina bermigrasi ke luar negeri. Imigrasi yang dilakukan oleh orang Cina di Malaysia telah merubah mereka menjadi etnis minoritas di negara tersebut.<sup>187</sup> Jumlah populasi orang Cina di Malaysia menurun menjadi hanya sebesar 26%.<sup>188</sup>

Selain imigrasi orang Cina, KEB juga telah menimbulkan pembicaraan-pembicaraan umum mengenai masalah etnis, khususnya mengenai hak-hak istimewa

---

<sup>185</sup> Tan Teong Jin dan Ho Wah Foon, *Op. Cit.*, hlm. 64

<sup>186</sup> *Ibid.*

<sup>187</sup> *Ibid.*, hlm. 65

<sup>188</sup> *Ibid.*

Melayu dan juga hak-hak yang dipunyai oleh orang-orang Cina yang dibatasi oleh Pemerintah. Kemudian diberlakukan undang-undang mengenai koordinasi Industri, yaitu ICA (*Industrial Coordination Act*) pada tahun 1975. UU tersebut menambah kekecewaan orang Cina terhadap Kebijakan Ekonomi Baru.<sup>189</sup>

ICA yang dimaksudkan pemerintah untuk memperluas partisipasi ekonomi Melayu, tetapi UU itu sudah jelas tidak disukai oleh Orang-orang Cina, oleh karena itu banyak pebisnis-pebisnis Cina yang menolak untuk memperluas operasi perusahaannya untuk menghindari pertentangan dengan hukum. Penolakan Cina terhadap ICA mencapai puncaknya ketika orang terkaya di Malaysia pada saat itu Robert Kuok Hock Nien, memindahkan kantor pusat perusahaannya Kwok Brothers dari Kuala Lumpur ke Hongkong.<sup>190</sup>

MCA sebagai perwakilan dari orang-orang Cina kemudian melihat bahwa perusahaan-perusahaan milik Cina harus berubah dari yang sebelumnya perusahaan keluarga menjadi perusahaan yang lebih besar.<sup>191</sup> Kemudian perusahaan-perusahaan keluarga milik Cina mulai dimodernisasi dan memperkerjakan orang-orang yang bukan termasuk keluarga sebagai pemimpin perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut belajar mendapatkan dana dari bank dan pasar modal, tidak lagi dari teman, keluarga ataupun anggota-anggota sukunya masing-masing.

MCA mengadakan kongres ekonomi pada 1974 yang hasilnya adalah pendirian badan hukum di dalam komunitas Cina.<sup>192</sup> Termasuk membentuk kerjasama dengan pengusaha-pengusaha Melayu. Kerjasama yang diadakan oleh orang-orang Melayu dan Cina kemudian dinamakan kerjasama Ali-Baba.<sup>193</sup> Ali dimaksudkan sebagai pihak Melayu, sedangkan nama Baba dimaksudkan sebagai pihak dari Cina. Pada kerjasama tersebut orang Melayu memperbolehkan nama dan pengaruh yang mereka miliki dalam pemerintahan digunakan oleh rekan Cina mereka

---

<sup>189</sup> *Ibid.*

<sup>190</sup> Tan Teong Jin dan Ho Wah Foon, *Ibid.*, hlm. 66

<sup>191</sup> R.S. Milne, *Loc.Cit.*, hlm. 252

<sup>192</sup> *Ibid.*

<sup>193</sup> Tan teong Jin dan Ho Wah Foon, *Op.Cit.*, hlm.69

untuk memenangkan kontrak-kontrak konstruksi milik Pemerintah dan proyek-proyek lainnya.

KEB telah membuat orang-orang Cina yang biasanya menjadi pemimpin dalam bidang ekonomi harus mengikuti Melayu dalam mendapatkan kontrak-kontrak milik pemerintah walaupun dominasi Cina tetapi ada dalam bidang lainnya.<sup>194</sup> Selama berlangsungnya Kebijakan Ekonomi Baru orang-orang Cina tetap mendominasi dalam bidang konstruksi, perdagangan grosir dan eceran, transportasi, manufaktur dan sektor lainnya dimana pebisnis Melayu masih kurang dalam ketrampilan dan pengalaman.

Reaksi dari orang-orang India terhadap Kebijakan Ekonomi baru tidak jauh berbeda dengan reaksi dari orang-orang Cina. Mereka juga merasa kecewa dengan KEB yang mereka anggap hanya menguntungkan orang-orang Melayu. Kemudian MIC sebagai perwakilan mereka dalam Pemerintahan membuat rencana (*Blueprint*) dalam Kebijakan tersebut dan mengevaluasi posisi orang India dalam bidang ekonomi bila dibandingkan dengan etnis lainnya. Perhatian khusus diberikan MIC dalam masalah pengangguran yang jumlahnya relatif tinggi, alokasi perkampungan-perkampungan India dan izin masuk untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi bagi orang-orang India. Selain itu MIC juga membentuk perkumpulan untuk mendorong lebih banyak lagi orang-orang India untuk ikut berpartisipasi dalam bidang ekonomi.

Selain reaksi dari orang-orang India dan Cina, juga terdapat reaksi dari orang Melayu. Reaksi yang diberikan orang Melayu terhadap Kebijakan Ekonomi Baru berhubungan dengan bidang politik. Orang Melayu takut kalau kebijakan Ekonomi Baru akan lebih menguntungkan non-Melayu, khususnya Cina.

---

<sup>194</sup> R.S. Milne, *Loc.Cit.*, hlm. 252

### IV.3. Keadaan Malaysia pasca kerusuhan

Setelah parlemen ditangguhkan setelah terjadinya kerusuhan 13 Mei di Malaysia, NOC pun dibentuk sebagai pemerintahan darurat dengan Tun Abdul Razak sebagai pimpinannya. Kemudian parlemen di Malaysia diaktifkan kembali pada tahun 1971.<sup>195</sup> Pada saat parlemen diaktifkan kembali Tunku Abdul Rahman sudah tidak lagi menjabat sebagai Perdana menteri, karena ia sudah mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun sebelumnya. Sebagai gantinya, Tun Abdul Razak kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Setelah kerusuhan Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melarang pembicaraan tentang masalah-masalah sensitif yang ada di Malaysia.

Pelarangan pembicaraan mengenai masalah-masalah sensitif tentang hak-hak istimewa Melayu, Kewarganegaraan, Bahasa Melayu sebagai Bahasa Nasional dan Agama Islam sebagai agama resmi negara. Setelah kerusuhan Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi. Perbincangan mengenai masalah-masalah sensitif akan dianggap sebagai tindakan menghasut. Kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan Pemerintah Malaysia demi mencapai kesatuan nasional pasca terjadinya kerusuhan 13 Mei. Dengan kebijakan tersebut negara juga akan lebih mudah dalam memperbaiki keadaan di Malaysia.

MCA dan MIC yang menderita kekalahan dalam pemilihan umum 1969 dari partai-partai oposisi DAP, Gerakan dan PPP diberi peringatan oleh UMNO, jika mereka masih tidak membenahi diri maka lebih baik Perserikatan dibubarkan saja.<sup>196</sup> Sebagai jawaban atas peringatan UMNO tersebut kemudian MCA membentuk Gerakan persatuan Cina. Pada awalnya Gerakan ini Tun Tan Siew Sin sebagai ketua MCA serta beberapa tokoh MCA lainnya ikut ambil bagian didalamnya.<sup>197</sup> Gerakan baru tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat Cina serta mendapat dukungan yang luas. Begitu pesatnya pertumbuhan gerakan tersebut sehingga pemerintah dan para pemimpin MCA menganggap gerakan itu berbahaya. Kemudian gerakan tersebut berencana mendaftarkan diri sebagai sebuah partai, tapi pemerintah

<sup>195</sup> Barbara Watson dan Leonard Andaya, *Op.Cit.*, hlm. 340

<sup>196</sup> *Ibid*, hlm. 341

<sup>197</sup> Barbara Watson dan Leonard Andaya, *Ibid*, hlm. 342

kemudian menolaknya dengan menahan dua pendiri dari gerakan tersebut. Pemerintah menganggap gerakan tersebut sebagai penghasut yang bisa membahayakan kesatuan nasional.

Dengan bubarnya gerakan persatuan Cina, beberapa orang anggotanya yang aktif kemudian memutuskan untuk kembali ke MCA dengan harapan untuk melakukan gerakan pembaharuan di dalam partai tersebut. Pada awalnya pemerintah menganggap masuknya bekas-bekas anggota Gerakan kedalam MCA sebagai langkah yang positif, tetapi anggapan tersebut berubah ketika langkah yang dianggap positif tersebut berubah menjadi perpecahan yang terjadi di dalam partai. Perpecahan tersebut terjadi untuk memperebutkan kekuasaan di dalam partai. Dengan terjadinya perpecahan tersebut menjadikan MCA semakin lemah di mata UMNO dan anggapan bahwa MCA sebagai wakil tunggal bagi orang-orang Cina semakin kurang meyakinkan.<sup>198</sup> Kejadian tersebut menyebabkan dibentuknya Barisan Nasional oleh Tun Abdul Razak.

Pada tahun 1973 Tun Abdul Razak mendirikan Barisan Nasional sebagai Pengganti dari Perserikatan yang dianggap sudah melemah kekuatannya untuk bertanding dalam pemilihan Umum yang akan diadakan pada 1974. Anggota-anggota Barisan nasional tersebut pada awalnya anggota-anggota Perserikatan, yaitu UMNO, MCA dan MIC. Kemudian pada awal 1973 PMIP/PAS yang merupakan partai oposisi dari UMNO menjadi anggota dari barisan tersebut.<sup>199</sup> Setelah itu bergabung juga Partai Gerakan, PPP, SUPP, *Parti Pesaka Bumiputera Bersatu* (PBB) dan *Sabah Alliance Party* (SAP).<sup>200</sup> Koalisi partai-partai dalam Barisan Nasional tersebut menggantikan formula Perserikatan yang telah memerintah di Malaysia sejak Kemerdekaan.

Kerjasama antara partai-partai tersebut dalam Barisan Nasional dimulai pada Pemilihan Umum 1974. Lawan utama dari Barisan Nasional dalam Pemilihan Umum 1974 adalah DAP yang diketuai oleh Lim Kit Siang.<sup>201</sup> Hasil Pemilihan Umum yang

<sup>198</sup> *Ibid.*

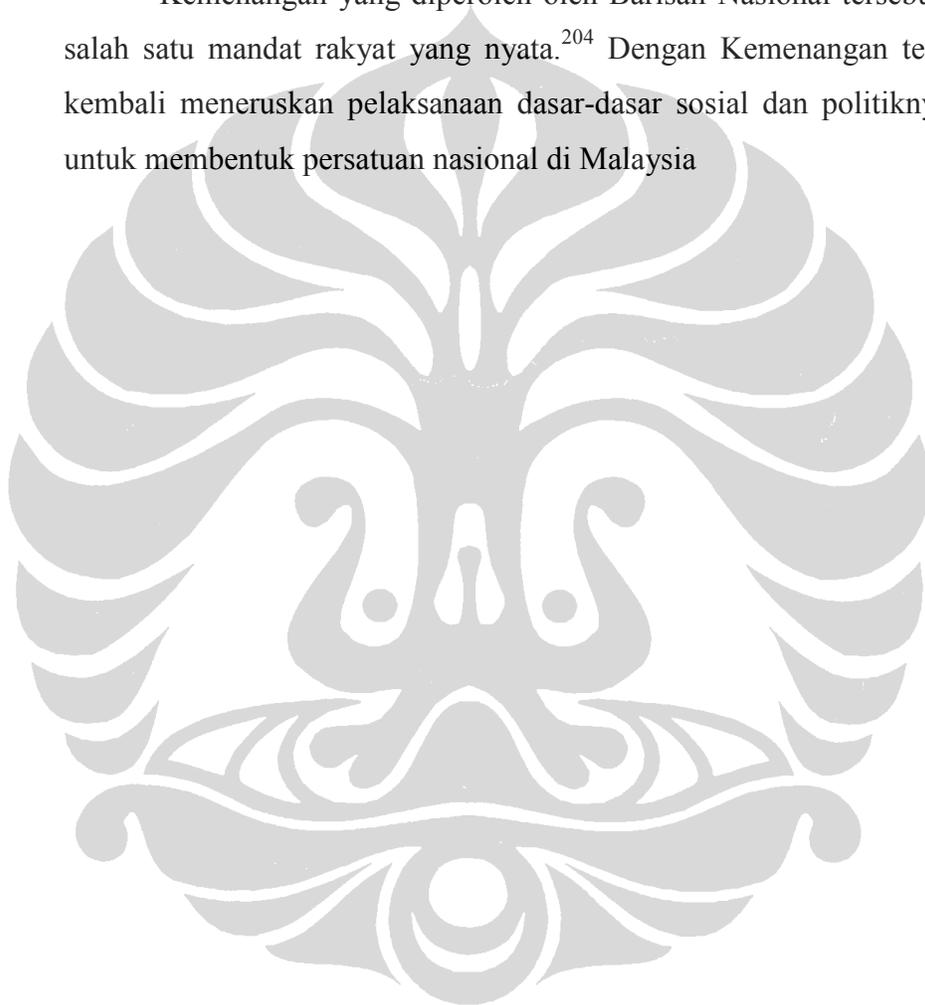
<sup>199</sup> Paridah Abd. Samad, *Op.Cit.*, hlm. 121

<sup>200</sup> *Ibid.*

<sup>201</sup> Barbara Watson, *Op.Cit.*

dilaksanakan pada bulan Agustus 1974 memperlihatkan kemenangan bagi Barisan Nasional. Barisan Nasional memenangkan 104 kursi dari 114 kursi yang diperebutkan dan 62 kursi yang didapatkan adalah milik UMNO.<sup>202</sup> Barisan Nasional juga berhasil menang di semua negara bagian, termasuk Kelantan yang menjadi basis dari PAS, dikarenakan PAS yang telah bergabung ke dalam Barisan Nasional.<sup>203</sup>

Kemenangan yang diperoleh oleh Barisan Nasional tersebut juga merupakan salah satu mandat rakyat yang nyata.<sup>204</sup> Dengan Kemenangan tersebut Pemerintah kembali meneruskan pelaksanaan dasar-dasar sosial dan politiknya yang bertujuan untuk membentuk persatuan nasional di Malaysia



---

<sup>202</sup> *Ibid.*, hlm. 343

<sup>203</sup> *Ibid.*

<sup>204</sup> *Ibid.*